

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Kondisi sistem administrasi pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara sekarang belum maksimal. Sistem loket yang belum berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan BPN RI untuk kantor pertanahan seluruh Indonesia;
2. Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan sistem administrasi pertanahan sesuai standar kebijakan BPN RI pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara adalah:
 1. Keterbatasan sumber daya manusia yang jelas terlihat dari kebanyakan jabatan eselon V yang masih kosong sehingga tugas pokok dan fungsinya belum dapat berjalan dengan baik;
 2. Kurangnya tenaga ahli dalam pelaksanaan sistem administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Jakarta Utara;
 3. Tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga belum dapat menerapkan sistem loket secara komputerisasi;
 4. Tingkat permohonan sertifikat yang masih minim menyebabkan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara kurang perhatian yang khusus dari kantor yang setingkat di atasnya.

5.2 Saran

1. Melengkapi sarana dan prasarana dalam proses pelayanan masyarakat, misalnya dengan memfasilitasi komputerisasi pada setiap

bagian/petugas yang melaksanakan sistem pelayanan administrasi pertanahan.

2. Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci dalam pelaksanaan tugas-tugas pertanahan, sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara khususnya dalam rangka pelaksanaan administrasi pertanahan. Salah satu kompetensi yang mempengaruhi kinerja adalah petugas lapangan (khusus juru ukur) dan tenaga operator komputer. Berdasarkan data kepegawaian jumlah PNS di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara adalah 75 orang. Dengan jumlah tersebut, sebagai unit pelayanan langsung ke masyarakat, Kantor Pertanahan Jakarta Utara saat ini masih kekurangan pegawai, akibatnya sistem administrasi pertanahan belum bisa dijalankan dengan baik dan maksimal. Strategi agar sistem administrasi pertanahan pada Kantor Pertanahan Jakarta Utara dapat menjadi lebih baik lagi sehingga dapat mewujudkan sebelas agenda kebijakan BPN RI khususnya poin pertama dan kedua yaitu:

1. Melengkapi kebutuhan sumber daya manusia sehingga tugas-tugas pokok dan fungsi pejabat struktural dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan efektif;
2. Memperbanyak tenaga ahli dalam menjalankan sistem pelayanan pertanahan dan administrasi pertanahan dengan mengadakan pendidikan-pendidikan sebagai wujud kepedulian bagi kantor-

kantor pertanahan yang masih baru sehingga dengan timbulnya tenaga-tenaga ahli baru maka sistem dapat berjalan dengan lebih baik lagi;